

## **BAB 1**

### **Pendahuluan**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pada 16 Agustus 2019, akun Twitter Amnesty International mempublikasikan sebuah video dengan deskripsi "This is Hong Kong's leaderless protest movement". Video berdurasi empat menit 24 detik tersebut menunjukkan liputan dari dekat peserta unjuk rasa berumur 24 tahun yang melakukan unjuk rasa setiap akhir pekan, yang disambungkan dengan gambar dilontarkannya gas air mata kepada kelompok pengunjung rasa dibalik blokade jalan. Dalam cuplikan yang mempertanyakan alasan mengapa banyak orang-orang muda yang ikut serta dalam unjuk rasa tersebut, seorang wanita yang diwawancarai dalam video tersebut menyebutkan bahwa, "the only thing we can do is guard our home. I want our home to become a better place, not a worse one"<sup>1</sup>.

Video tersebut bukan upaya pertama Amnesty International untuk menyebarluaskan peristiwa unjuk rasa Hong Kong pada saat itu. Pada tanggal 15 Juni 2019, akun Twitter Amnesty International mempublikasikan video dengan deskripsi sebagai berikut:

“People in Hong Kong are resisting the proposed law that will put them and others at risk of extradition to mainland China. Act now and demand that the Hong Kong government withdraw the amendments and ensure the right to freedom of peaceful assembly”<sup>2</sup>.

Video berdurasi 57 detik tersebut menunjukkan lautan massa unjuk rasa dengan keterangan yang menyebutkan lebih dari satu juta orang ikut berunjuk rasa menolak

---

<sup>1</sup> Amnesty International (@amnesty), "This is Hong Kong's leaderless protest movement." *Twitter*, 17 Agustus 2019, <https://twitter.com/amnesty/status/1162385448506994697>.

<sup>2</sup> Amnesty International (@amnesty), "People in Hong Kong are resisting the proposed law that will put them and others at risk of extradition to mainland China." *Twitter*, 15 Juni 2019, <https://twitter.com/amnesty/status/1139804903361011713>.

keputusan pemerintah untuk mengubah hukum yang memungkinkan ekstradisi dari Hong Kong ke Tiongkok meskipun Hong Kong memiliki sistem judisial yang terpisah. Video tersebut juga menunjukkan adanya dukungan berupa unjuk rasa serupa di luar negeri, seperti di New York, Amerika Serikat dan London, Inggris, serta meminta dukungan tambahan kepada pengguna Twitter untuk turut menekan pemerintah Hong Kong melalui penyebaran video dan penggunaan *hashtag* #ExtraditionBill di media sosial Twitter.

Unjuk rasa Hong Kong 2019-2020 merujuk kepada runtutan aktivitas unjuk rasa dan protes yang terjadi sepanjang Maret 2019 hingga Juli 2020. Unjuk rasa Hong Kong 2019-2020 dipicu oleh pengajuan *Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019* atau juga disebut sebagai *extradition bill* atau undang-undang ekstradisi pada Februari 2019. Amandemen undang-undang tersebut memungkinkan penangkapan tersangka kriminal di dalam Hong Kong berdasarkan permintaan otoritas di luar Hong Kong, yang dikritik memungkinkan adanya penangkapan politis masyarakat Hong Kong oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, yang memiliki sistem hukum dan politik yang terpisah sebagai wilayah administrasi spesial<sup>3</sup> <sup>4</sup>. Aksi unjuk rasa yang awalnya dilakukan sebagai protes atas pembentukan undang-undang ekstradisi tersebut pada akhirnya berubah dari yang sebelumnya berupa anti-ekstradisi menjadi unjuk rasa anti-autoritarianisme dengan cakupan isu dan tuntutan yang lebih luas dan mendasar.

Awal mula dari unjuk rasa Hong Kong 2019-2020 dapat ditarik pada tanggal 15 Maret 2019, ketika unjuk rasa pertama dalam bentuk aksi pendudukan di Komplek Sentral Pemerintah terkait penarikan undang-undang ekstradisi terjadi yang diprakarsai oleh

---

<sup>3</sup> Legislative Council Commission, *Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019*, 2019, <https://www.legco.gov.hk/yr18-19/english/bills/b201903291.pdf>

<sup>4</sup> Jessie Yeung, "From an extradition bill to a political crisis: A guide to the Hong Kong protests," *CNN*, 20 Desember 2019, <https://edition.cnn.com/2019/11/15/asia/hong-kong-protests-explainer-intl-hnk-scli/index.html>

Demosisto, sebuah organisasi pro-demokrasi yang diusung oleh Joshua Wong, Agnes Chow, dan Nathan Law. Unjuk rasa tersebut kemudian disusul dengan unjuk rasa-unjuk rasa berikutnya dengan tingkat keikutsertaan yang lebih tinggi, dengan estimasi peserta sebanyak 12.000 dan 130.000 orang pada tanggal 31 Maret dan 28 April 2019. Unjuk rasa tersebut diprakarsai oleh Civil Human Right Front atau CHRF, sebuah organisasi yang terdiri dari 50 kelompok pro-demokrasi Hong Kong, dengan agenda yang sama yaitu menuntut penarikan undang-undang ekstradisi.

Peristiwa yang patut diperhatikan adalah unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 9 dan 16 Juni 2019, baik karena skala unjuk rasa yang besar dan perubahan substansi tuntutan yang diajukan dalam unjuk rasa. Dalam unjuk rasa ini tuntutan yang diminta dalam unjuk rasa berkembang dari yang sebelumnya hanya seputar penarikan undang-undang ekstradisi menjadi lima poin tuntutan: pertama, penarikan penuh pengesahan undang-undang ekstradisi; kedua, pembentukan tim penyelidikan independen atas kebrutalan kepolisian; ketiga, penarikan penyebutan unjuk rasa-unjuk rasa awal sebagai “kerusuhan”; keempat, pembebasan pihak-pihak yang ditangkap dalam kegiatan unjuk rasa; kelima, penerapan hak pilih universal di Hong Kong<sup>5</sup>. Slogan “Five demand, not one less” (五大訴求, 缺一不可) yang banyak diserukan dalam unjuk rasa besar setelah Juni 2019 memberikan gambaran atas keinginan dipenuhinya kelima tuntutan unjuk rasa tanpa kompromi satupun. Unjuk rasa setelah Juni 2019 lebih banyak diikuti peserta yang lebih sedikit dengan kondisi yang lebih spontan, terlebih karena adanya larangan berkumpul setelah wabah COVID-19 menerpa Hong Kong pada akhir 2019 dan banyak unjuk rasa besar yang ditolak ijinnya oleh kepolisian Hong Kong.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok mengesahkan penetapan hukum keamanan nasional bagi wilayah Hong Kong, yang dalam pasalnya mencakup aksi “separatism, intervensi luar negeri, terorisme, dan subversi melawan pemerintah pusat,” yang memungkinkan otoritas Tiongkok untuk

---

<sup>5</sup> Yeung, “From an extradition bill to a political crisis.”

mengasumsikan yuridiksi dalam kasus tertentu di Hong Kong untuk diadili di bawah hukum Tiongkok<sup>6</sup>. Hal ini mengakibatkan berhentinya seluruh aktivitas terkait unjuk rasa anti-ekstradisi Hong Kong karena kekhawatiran masyarakat jika mereka akan ditangkap dan diadili karena dianggap melawan pemerintah Tiongkok jika turut berpartisipasi di dalam unjuk rasa. Hal ini merupakan salah satu dari bentuk represi pemerintah Hong Kong dan Tiongkok atas unjuk rasa anti-ekstradisi yang telah berjalan. Amnesty International banyak meliput represi yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian Hong Kong selama unjuk rasa anti-ekstradisi berlangsung sebagai upaya advokasi kepada masyarakat internasional.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang telah ditulis sebelumnya, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana taktik advokasi Amnesty International terkait tindakan represif pemerintah Hongkong terhadap unjuk rasa anti-ekstradisi tahun 2019-2020?

## 1.3. Tinjauan Literatur

Berikut ini adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari dua bidang terkait rumusan masalah, yaitu sejarah aktivisme dan pergerakan sosial di Hong Kong dan aktivisme digital *Arab Spring*. Keduanya memiliki keterkaitan dengan unjuk rasa Hong Kong 2019-2020 dari asal-usul permasalahan yang mendasari terpicunya unjuk rasa Hong Kong 2019-2020, serta pola penyebaran informasi secara internasional secara digital yang berkaitan dengan upaya penyebaran isu unjuk rasa Hong Kong 2019-2020 oleh Amnesty International.

### 1.3.1. Sejarah Aktivisme dan Pergerakan Sosial di Hong Kong

---

<sup>6</sup> Secara resmi bernama 中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法 atau *Law of the People's Republic of China on Safeguarding National Security in the Hong Kong Special Administrative Region*

Pergerakan sosial demokratis di Hong Kong telah terbentuk jauh pada tahun 1967, sebelum pemerintahan kolonial Inggris berakhir. Pada saat itu, pergerakan sosial demokratis bersikap kritis kepada pemerintahan Inggris maupun Tiongkok<sup>7</sup>. Terdapat dorongan dari sisi ekonomi, sosial, dan politik di masyarakat Hong Kong untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik melalui organisasi masyarakat sipil dan semacamnya. Dorongan dari sisi ekonomi muncul karena loncatan ekonomi dan reformasi sosial pada tahun 1970an membuahkan hasil pengembangan sosial yang dapat dirasakan masyarakat kelas bawah, yang mendorong adanya permintaan dari masyarakat atas perbaikan sosial. Dorongan dari sisi sosial muncul karena adanya jurang antara kualitas jasa yang mampu diberikan oleh pemerintah dan kebutuhan atas perkembangan sosial dan permintaan dari warga lokal, yang menghasilkan permintaan yang lebih atas reformasi sosial. Dorongan dari sisi politik muncul karena 'demokrasi konsultatif' yang diterapkan pemerintah kolonial menghasilkan iklim politik yang relatif toleran terhadap protes sosial dan petisi, dan menghasilkan '*political opportunity structure*' yang mendorong partisipasi politik<sup>8</sup>.

Meskipun demikian, partisipasi politik dari massa masyarakat dan organisasi masyarakat sipil masih terbilang lemah karena pengaruh, aksi, dan sarana pengaruhnya lebih bersifat diskursif. Dengan struktur pemerintahan yang tidak demokratis dan tidak adanya pengaruh struktur institusional, organisasi masyarakat sipil tidak memiliki banyak kemampuan untuk mengubah kebijakan pemerintah kecuali dengan memobilisasi opini publik untuk menaruh tekanan kepada pemerintah melalui aksi di jalanan. Dibandingkan perkembangan yang terjadi pada tahun 1980an, terdapat pemisahan secara perlahan antara masyarakat politik dengan masyarakat sipil yang terlihat di Hong Kong pada tahun 1990an. Karena faktor tersebut, masa awal tahun

---

<sup>7</sup> Ho-Fung Hung & lam-chong Ip, "Hong Kong's Democratic Movement and the Making of China's Offshore Civil Society," *Asian Survey*, Vol. 52, No. 3 (2012): 506

<sup>8</sup> Ngok Ma, "Social Movements and State-Society Relationship in Hong Kong," dalam *Social Movements in China and Hong Kong: The Expansion of Protest Space*, diedit oleh K. E. Kuah-Pearce & G. Guiheux (Amsterdam University Press, 2009): 47.

1990an dihadapkan dengan kemunculan 'pergerakan sosial baru' diantara organisasi masyarakat sipil, yang lebih menekankan diskusi dalam massa yang berpartisipasi terkait tujuan dan arah aksi serta pengambilan keputusan secara kolektif, dengan peranan pengorganisir profesional yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Secara ideologis, beberapa aktivis dari generasi baru tersebut juga menjadi semakin *anti-establishment* dan berorientasi partikularistik<sup>9</sup>.

Terpisahnya masyarakat sipil dengan masyarakat politik tidak membuat pergerakan sosial di Hong Kong menghilang setelah tahun 1997, melainkan hanya berubah bentuk. Setelah Hong Kong menjadi *Special Administrative Region* Tiongkok pasca 1997, kerangka konstitusionalnya kurang lebih memberikan naungan bagi pergerakan sosial dan aktivitas masyarakat sipil. Hukum dasar memberikan tingkat kebebasan sipil yang setara dengan negara-negara barat bagi Hong Kong pasca 1997<sup>10</sup>. Setelah tahun 1997, pergerakan demokratis seperti Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Movement (HKASPDM) dipandang sebagai pengkhianat oleh pemerintah Tiongkok namun dilihat sebagai pelindung kebebasan di Hong Kong, dan menerima dukungan yang besar di Hong Kong. Analisis Ma menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil pasca 1997 secara efektif menggunakan aksi protes untuk melawan pelanggaran yang dirasakan oleh masyarakat sipil dari negara, dengan jumlah pertemuan publik dan prosesi rata-rata sebanyak 2200 setiap tahunnya<sup>11</sup>. Meskipun begitu, organisasi masyarakat sipil kurang berhasil dalam memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakan mereka. Di sisi lain, pergerakan demokratis seperti HKASPDM sulit diberantas oleh pemerintah Tiongkok karena tidak bisa dilawan langsung melalui represi, yang dapat menimbulkan kekacauan di teritori Hong Kong dan bertentangan dengan rencana yang mungkin dibuat oleh Tiongkok untuk menjadikan Hong Kong sebagai percontohan unifikasi Taiwan dengan Tiongkok. Selain itu, dampak tersebut

---

<sup>9</sup> Ma, "Social Movements," 49-52.

<sup>10</sup> Ma, "Social Movements," 52.

<sup>11</sup> Ma, "Social Movements," 52-54.

juga bertentangan dengan rencana tertulis Tiongkok untuk menjadikan Hong Kong sebagai *offshore financial center* untuk internasionalisasi RMB yang memerlukan struktur legal yang kredibel, kebebasan pers, dan stabilitas politik<sup>12</sup>.

Terdapat peningkatan jumlah front ad hoc yang dibentuk oleh organisasi masyarakat sipil di berbagai area pada masa setelah 1997 yang mulai populer pada pertengahan tahun 1990an. Pada umumnya koalisi ad hoc tersebut tidak menghasilkan organisasi formal dan sedikit sumber daya organisasional, dan seringkali tidak tercatat sebagai organisasi formal ataupun kelompok masyarakat yang terdaftar. Koalisi ad hoc tersebut biasanya bertahan hanya dalam hitungan bulan, dan akan menjadi tidak aktif setelah berlalunya isu ataupun terdapat langkah aksi tertentu. Aksi front ad hoc yang dilakukan oleh masyarakat Hong Kong biasanya berupaya untuk menyuarakan keberatan atas isu tertentu dan bisa jadi mendorong pemerintah untuk memikirkan kembali isu tersebut jika mereka mampu mengumpulkan perhatian publik yang cukup. Pada umumnya koalisi ad hoc tersebut tidak menghasilkan organisasi formal dan sedikit sumber daya organisasional, bertahan hanya dalam hitungan bulan, dan akan menjadi tidak aktif setelah berlalunya isu ataupun terdapat langkah aksi tertentu. Dengan rentang waktu aktif yang sedikit tersebut, front ad hoc tersebut seringkali tidak mampu mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk membentuk pergerakan yang berjalan secara berkepanjangan untuk mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah<sup>13</sup>.

Ketidakpuasan masyarakat atas pemerintah Hong Kong pada tahun 2003 karena virus SARS dan sulit pulihnya ekonomi setelah krisis finansial 1997-8 direspon oleh pemerintah Hong Kong dengan dikeluarkannya legislasi anti-subversi sesuai dengan Artikel 23 Hukum Dasar, yang kemudian ditentang berbagai pihak karena dianggap mengancam kebebasan bersuara semenjak waktu kolonial. Respon terbesar tersebut berupa protes 1 Juli 2003 yang diikuti oleh setengah juta pengunjung rasa di jalan, yang

---

<sup>12</sup> Hung & Ip, "Hong Kong's Democratic Movement," 507-508.

<sup>13</sup> Ma, "Social Movements," 54-55.

berujung kepada penghentian tanpa tenggat waktu atas legislasi Artikel 23. Implementasi *Closer Economic Partnership Agreement* atau CEPA oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2003 yang bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi Tiongkok dan Hong Kong justru malah menghasilkan *bubble* aset dan kebutuhan hidup, yang berujung kepada adanya preferensi terhadap kelompok demokratis yang lebih raikal seperti League of Social Democrats (LSD) dan Civic Party (CP) pada tahun 2008. Dalam menghadapi gelombang mobilisasi tersebut, Tiongkok juga langsung mundur ketika dihadapkan kepada kemungkinan goyahnya stabilitas Hong Kong. Selain itu, meskipun kebebasan berbicara secara formal masih terjaga selama periode poskolonial, penyensoran mandiri diantara jurnalis dan editor meningkat, dan media semakin ragu untuk mengkritik pemerintah. Dengan kondisi tersebut, internet menjadi media alternatif bagi kegiatan aktivis pergerakan sosial Hong Kong<sup>14</sup>.

Media sosial seperti Weibo di Tiongkok dan Twitter yang memiliki pasar global menjadi instrumen penting dalam aktivitas aktivisme terkait isu yang terjadi di Hong Kong maupun Tiongkok daratan. Tidak hanya seputar isu non-politis seperti aksi *anti-Guangzhou-Hong Kong Express Rail Link* atau anti-XRL dan *anti-High Speed Railway* atau anti-HSR, namun juga dalam isu politis seperti saat tuntutan dibebaskannya tahanan politik Tiongkok pada tahun 2010. Selain media sosial, media berita berbasis internet seperti Southern Metropolitan Daily dan New Weekly yang beraliran liberal di Tiongkok juga banyak mempublikasikan berita terkait kampanye anti-XRL di Hong Kong, yang mendorong relasi antara masyarakat Hong Kong dan Tiongkok daratan yang saling mengikuti isu yang terjadi di seberang. Pada umumnya, pengguna internet di Tiongkok daratan yang memiliki pandang liberal menjadi semakin tertarik pada aktisme politik di Hong Kong dan mendukung pergerakan demokratis di sana<sup>15</sup>.

### 1.3.2. *Arab Spring* dan Aktivisme Demokrasi Digital

---

<sup>14</sup> Hung & Ip, "Hong Kong's Democratic Movement," 508-511.

<sup>15</sup> Hung & Ip, "Hong Kong's Democratic Movement," 516-517.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, belum ada penelitian yang secara eksplisit menelaah hubungan ataupun penggunaan aktivisme digital oleh aktor-aktor aktivis dalam kerangka TAN. Meskipun demikian, fenomena terkait aktivisme digital yang melibatkan aktor penting dalam TAN seperti NGO berbasis lingkungan dan kemanusiaan menjadi semakin sering terjadi. Dengan pertimbangan tersebut, penulis memasukkan studi literatur terkait fenomena *Arab Spring* dikarenakan keberadaanya sebagai salah satu fenomena kilas balik dalam sejarah aktivisme digital dan melibatkan isu kemanusiaan.

Analisis York menunjukkan tiga fase dari *Arab Spring* yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan komunikasi baru<sup>16</sup>. Setelah masuknya konektivitas internet di wilayah Arab, terbentuk generasi Blogger sebagai aktor utama aktivisme transnasional di Arab dengan blog bilingual dan bahkan trilingual dengan bahasa umum berupa bahasa Arab yang menyatukan blogger di berbagai negara Arab. Pada tahun 2006, meskipun tingkat penetrasi internet di negara-negara Arab saat itu terbilang rendah, jumlah blog di Arab mencapai perkiraan 25.000 blog, dan pada tahun 2009 jumlah tersebut meningkat menjadi 35.000 blog aktif. Jaringan aktivis transnasional tersebut terbentuk pada isu-isu yang sama di berbagai negara, seperti perlawanan terhadap kediktatoran dan sensor<sup>17</sup>.

Penggunaan media sosial telah menjadi umum sebagai bagian dari taktik aktivisme digital di negara-negara Arab yang bertumpukan dengan jaringan blog yang telah terbentuk sebelumnya. Setelah dirilisnya Facebook, Twitter, dan Youtube pada tahun 2006-2007, aktivis digital di Arab menggunakan platform-platform baru tersebut untuk kegiatan aktivisme yang lebih meluas dibandingkan sebelumnya. Dalam perkembangannya media sosial mengalami lonjakan pertumbuhan pengguna yang pesat di kawasan Arab dan semakin menjadi terpolitisasi seiring dengan

---

<sup>16</sup> Julian York, "The Arab Digital Vanguard: How a Decade of Blogging Contributed to a Year of Revolution." *Georgetown Journal of International Affairs*, Vol. 13, No. 1 (Winter/Spring 2012): 33-42

<sup>17</sup> York, "The Arab Digital Vanguard," 34.

diperkenalkannya fitur baru di dalam media sosial seperti fitur laman dan grup di Facebook. Perkembangan Twitter memungkinkan aktivis untuk menyebarkan konten yang diunggah di Facebook, Youtube, dan platform lain secara lebih luas, menarik perhatian yang lebih besar kepada isu di lokasi yang lebih tersentralisasi. Kasus seperti ditangkapnya blogger kawakan dari Mesir, Alaa Abd El Fattah atau Alaa Ahmad Seif El Islam memicu bergeraknya komunitas blog Arab. Komunitas Global Voices Online meluncurkan kampanye "Google bomb for Alaa" tiga hari setelah penangkapan pada tanggal 7 Mei, dengan mendorong pengguna internet untuk memanipulasi hasil pencarian mesin pencari Google untuk menarik perhatian lebih kepada isu tersebut. Tidak hanya berhasil mencapai kesadaran internasional dengan sifat kampanye yang transnasional, kampanye tersebut juga secara tidak sengaja menghasilkan meme terkait kasus serupa di negara-negara Arab lainnya. Kampanye untuk membebaskan blogger lain yang ditangkap pemerintah telah melintasi batas negara dan menyebar hingga Maroko dan Syria, dan ikut menggunakan metode dan gaya kampanye yang serupa dengan kampanye "Free Alaa"<sup>18</sup>.

Peliputan berita terkait awal dari *Arab Spring* tidak lepas dari keterlibatan blogger Arab. Setelah kasus pembakaran diri Mohammed Bouazizi, media internasional dilarang meliput pemberontakan yang terjadi mengikuti peristiwa tersebut di Tunisia. Dihadapkan dengan kondisi tersebut, blogger Tunisia menggantikan peranan media dengan mengunggah foto, video, dan analisis dari peristiwa yang terjadi. Selain itu, liputan Al Jazeera dan siaran France24 dan kanal berita lainnya mampu melewati perbatasan Tunisia, dan mendorong analisis dari blogger maupun cendekiawan bahwa pemberontakan tersebut dapat memiliki efek domino di kawasan tersebut. Terinspirasi oleh peristiwa di Tunisia, yang berhasil menggulingkan Ben Ali pada tanggal 14 Januari 2011, blogger dari Mesir mulai merundingkan tujuan revolusioner mereka sendiri. Tidak hanya menggunakan media blog yang sudah lama mereka gunakan untuk mendiskusikan ide mereka, sebagian pengguna internet Mesir berpaling ke Twitter,

---

<sup>18</sup> York, "The Arab Digital Vanguard," 35.

pertama untuk mempromosikan unjuk rasa 25 Januari dengan tagar "#jan25", lalu kemudian bertwit secara langsung pada saat unjuk rasa di seluruh negeri. CNN dan media massa lainnya juga menggunakan Twitter sebagai dasar liputan mereka untuk meliput aksi di jalanan<sup>19</sup>. Konten berbahasa Arab juga diunggah ke Twitter dan Facebook dalam keadaan sepenuhnya diterjemahkan. Proyek seperti Global Voices dan Meedan berupaya membawa blog-blog dan konten media sosial berbahasa Arab ke pembaca arus utama. Tagar yang digunakan di Twitter juga memiliki signifikansi dalam unjuk rasa di jalanan. Pertama kali digunakan untuk menarik perhatian di media sosial kepada unjuk rasa di jalanan, tagar tersebut kemudian dikenakan pada kaus baju dan sebagai instrumen unjuk rasa sebagai simbol jangka pendek bagi unjuk rasa tersebut<sup>20</sup>. Isu Arab Spring yang terlihat di permukaan muncul begitu saja pada kenyataannya merupakan hasil dari proses selama hampir satu dekade. Penulis melihat pola yang serupa terlihat dalam unjuk rasa Hong Kong tahun 2019-2020, mulai dari awal terjadinya unjuk rasa yang dipicu oleh isu yang telah lama menjadi permasalahan di Hong Kong, hingga proses unjuk rasa yang menggunakan media sosial dan internet sebagai instrumen utama penyampaian berita dan fakta lapangan dari Hong Kong ke luar negeri.

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Penulis akan meneliti bagaimana Amnesty International membingkai isu represi pemerintah dan kepolisian Hong Kong dalam unjuk rasa Hong Kong 2019-2020.

#### 1.5. Kerangka Berpikir

Efek Bumerang atau Pola Bumerang merupakan salah satu konfigurasi Jaringan Advokasi Transnasional (TAN) yang pertama kali diusung oleh Margaret E. Keck &

---

<sup>19</sup> York, "The Arab Digital Vanguard," 37.

<sup>20</sup> York, "The Arab Digital Vanguard," 38.

Kathryn Sikkink<sup>21</sup>. Pola bumerang memberikan peluang bagi aktor lokal ataupun domestik untuk mencapai pengaruh yang mereka butuhkan di tingkat lokal melalui sekutu internasional, terutama aktivis di negara maju atau negara utara dan negara kekuatan utama untuk bekerja menekan pemerintah melalui sisi yang berbeda. Ketika pemerintahan sebuah negara melanggar atau menolak rekognisi hak masyarakat dan aktivis, kelompok maupun individu di tingkat domestik seringkali tidak memiliki jalan untuk melawan melalui arena politik domestik ataupun judisial. Dalam hal ini, mereka mungkin mencari koneksi internasional untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka dan bahkan untuk melindungi nyawa mereka<sup>22</sup>. Banyak TAN menghubungkan aktivis di negara maju dengan aktivis lain di negara berkembang. Ketika hubungan antara negara dan aktor domestik terputus, NGO domestik dapat mengarahkan sekutu internasional untuk memberi tekanan terhadap negara dari luar. Pola bumerang seperti ini banyak terdapat di kampanye terkait HAM. Ketika pemerintah tidak merespon kelompok dengan klaim yang dapat diterima di tempat lain, kontak internasional dapat memperkuat permintaan kelompok domestik, membuka ruang terbuka untuk isu baru, lalu kemudian menggaungkan permintaan tersebut kembali di arena domestik<sup>23</sup>.

Jaringan merupakan hal yang penting bagi kedua sisi di dalam pola bumerang. Dalam hal ini, jaringan merujuk kepada konsep organisasi yang terdiri dari pola komunikasi dan pertukaran horizontal yang terbentuk secara sukarela dan resiprokal<sup>24</sup>. Bagi aktor dari negara berkembang, jaringan memberikan akses, pengaruh, informasi, dan seringkali dana yang tidak bisa mereka dapatkan sendiri. Bagi aktor dari negara maju, mereka mendapat kredibilitas bagi tuntutan mereka bahwa mereka berjuang bersama, dan tidak hanya bagi, rekan mereka dari negara berkembang. Jaringan tidak terbentuk

---

<sup>21</sup> Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, "Transnational Advocacy Networks in International Politics: Introduction," dalam *Activist beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, (Cornell University Press, 1998), 12-13.

<sup>22</sup> Keck & Sikkink, "Transnational Advocacy Networks in International Politics," 12.

<sup>23</sup> Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, "Transnational advocacy networks in international and regional politics," *International Social Science Journal*, Vol. 68, Issue 227-228 (1999), 93.

<sup>24</sup> Keck & Sikkink, "Transnational Advocacy Networks in International Politics," 8.

begitu saja karena sebuah isu muncul di permukaan, namun karena aktivis berusaha untuk membangun jaringan internasional untuk mencapai tujuan yang mereka usung terkait isu tersebut. Aktivis adalah 'orang yang cukup peduli atas beberapa isu sehingga mereka bersedia untuk mencurahkan aksi dan biaya tertentu untuk mencapai tujuan mereka'<sup>25</sup>. Mereka membentuk jaringan ketika mereka percaya jaringan tersebut dapat mendorong misi organisasional mereka lebih lanjut; dengan berbagi informasi, mengupayakan visibilitas yang lebih banyak, memiliki akses kepada publik yang berbeda, menambah kanal akses institusional, dan lain-lain. Jaringan pada umumnya dibentuk berdasarkan kampanye atau isu tertentu. Seiring waktu, sebuah jaringan dapat membentuk jaringan yang lain. Dengan terbentuknya jaringan sebagai sarana aksi yang terlaksana secara transnasional, upaya pembentukan jaringan akan menjadi semakin mudah dibandingkan jaringan sebelumnya. Partisipasi di area isu tersebut di dalam jaringan transnasional menjadi bagian penting dari identitas kolektif bagi aktivis yang terlibat<sup>26</sup>. Susan Burgerman berargumen bahwa terdapat "kumpulan kondisi penting yang saling berinteraksi" yang berpengaruh kepada efektivitas advokasi transnasional yang berhubungan dengan konsep pola bumerang<sup>27</sup>: Pertama adalah keberadaan norma internasional yang dapat diaplikasikan; Kedua adalah adanya advokasi transnasional; Ketiga adalah adanya elite yang dapat dipengaruhi di dalam negara tujuan yang memiliki pengaruh terkait isu yang diangkat; Keempat adalah kelompok domestik terorganisasi yang memiliki hubungan dengan aktivis transnasional.

Sebagai bagian dari Pola bumerang, Keck & Sikkink menyebutkan empat taktik yang digunakan oleh TAN, diantaranya<sup>28</sup>:

---

<sup>25</sup> Oliver & Marwell (1992), 252 dalam Keck & Sikkink, "Transnational advocacy networks in international and regional politics," 93.

<sup>26</sup> Keck & Sikkink, "Transnational advocacy networks in international and regional politics," 93.

<sup>27</sup> Burgerman (2001), 50-60 dalam Elizabeth Bloodgood & Emily Clough, *NGO in International Affairs: An Agent-Based Model of the Boomerang Effect* (2008), 11.

<sup>28</sup> Keck & Sikkink, "Transnational advocacy networks in international and regional politics," 95-98.

1) *Information politics*, yaitu kemampuan untuk membuat informasi yang berguna secara politis dengan cepat dan terpercaya dan memindahkannya pada lokasi yang dapat menimbulkan dampak paling besar. Informasi yang dimiliki oleh TAN memiliki signifikansi tersendiri dari informasi formal yang dikeluarkan oleh aktor dengan legitimasi tertentu seperti pemerintah. TAN bertindak sebagai sumber informasi alternatif dibandingkan informasi resmi yang keluar berupa pernyataan dari pemerintah ataupun aktor terkait. Informasi yang dikeluarkan oleh TAN tidak hanya terdiri dari fakta, namun seringkali berupa testimoni dari individu ataupun kelompok yang kehidupannya terdampak secara langsung oleh isu yang diangkat oleh TAN;

2) *Symbolic politics*, yaitu kemampuan untuk menggunakan simbol, aksi, atau cerita yang masuk akal dan dapat dimengerti oleh audiens dengan kondisi yang jauh berbeda. Simbolisasi tersebut dapat melibatkan pengalaman yang telah dirasakan pada saat atau sebelum kampanye dilakukan di target audiens sebagai momentum untuk mempermudah dan memperkuat pemahaman isu yang diangkat. Keck & Sikkink mengangkat penggunaan gabungan beberapa peristiwa sekaligus dalam pembuatan kerangka simbolis, seperti kudeta di Chile, perang Vietnam, Watergate, dan hak sipil yang membentuk pergerakan hak asasi manusia di Amerika<sup>29</sup>;

3) *Leverage politics*, yaitu kemampuan untuk memanggil aktor kuat untuk mempengaruhi situasi yang sulit dipengaruhi atau diubah oleh anggota jaringan yang memiliki pengaruh yang lebih lemah. Terdapat dua jenis pengaruh yang diidentifikasi oleh Keck & Sikkink, yaitu pengaruh material dan pengaruh moral<sup>30</sup>. Pengaruh material berhubungan dengan uang dan barang, namun dapat pula dalam bentuk suara dalam organisasi internasional maupun keuntungan-keuntungan lainnya yang bersifat materiil. Sanksi ekonomi ataupun militer dapat menjadi dorongan untuk sebuah aktor negara untuk mengubah posisi ataupun kebijakannya terhadap sebuah isu. Dalam hal ini, aktor TAN memiliki peran untuk mempengaruhi aktor negara maupun non-negara

<sup>29</sup> Keck & Sikkink, "Transnational advocacy networks in international and regional politics," 97.

<sup>30</sup> Keck & Sikkink, "Transnational advocacy networks in international and regional politics," 97.

yang mampu memberikan sanksi tersebut dengan tujuan mempersuasi mereka untuk turut bertindak melalui kebijakan tertentu ataupun mengambil sikap yang diharapkan dapat membuahkan hasil kepada target kampanye mereka. Pengaruh moral dicapai menggunakan '*mobilization of shame*', dengan mengangkat norma atas isu yang menjadi sentral dalam TAN;

4) *Accountability politics*, yaitu kemampuan untuk memegang akuntabilitas dari aktor yang lebih kuat atas kebijakan atau prinsip yang sebelumnya telah mereka keluarkan.

Peluang bagi aktivitas jaringan meningkat sejak tahun 1980-an, diantaranya karena proliferasi organisasi internasional dan konferensi yang menjadi penting bagi kontak antar aktivis, sekaligus biaya perjalanan udara yang semakin murah dan perkembangan teknologi elektronik dan komunikasi baru yang mempercepat aliran informasi dan menyederhanakan kontak secara personal antar aktivis<sup>31</sup>.

Literatur *agenda setting* menunjukkan bagaimana media besar dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terkait isu tertentu berdasarkan liputan media. *Agenda setting* mendeskripsikan proses bagaimana media menggarisbawahi isu-isu yang dianggap penting melalui penekanan liputan dan publikasi terhadap isu tersebut. Berdasarkan teori *agenda setting*, masyarakat melihat bahwa isu yang mendapat liputan paling banyak dari media merupakan isu yang lebih penting dibandingkan isu-isu lain<sup>32</sup>. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa publikasi yang dilakukan oleh aktor TAN memiliki peranan yang setara dengan publikasi dari media dalam teori *agenda setting*.

Internet dapat digunakan sebagai sarana memberdayakan anggota masyarakat sipil yang termarginalisasi oleh sistem komunikasi tradisional. Temuan Lee atas ekspansi konektivitas internet di Asia Timur dan Tenggara, terutama media sosial dan jejaring sosial bersamaan dengan telepon pintar atau smartphone menunjukkan bahwa

<sup>31</sup> Keck & Sikkink, "Transnational advocacy networks in international and regional politics," 93.

<sup>32</sup> Baumgartner & Jones, 1995; McCombs & Shaw, 1972 dalam Johanna Dunaway, Regina P. Branton & Marisa A. Abrajano, "Agenda Setting, Public Opinion, and the Issue of Immigration Reform," *Social Science Quarterly*, Vol. 91, No. 2 (Juni 2010), 361.

penyebaran internet, terutama media sosial, dapat menyebar luas melebihi digital divide yang berdasarkan inekualitas sosio-ekonomi<sup>33</sup>. Internet memiliki peran sebagai tambahan kapabilitas politik bagi mobilisasi akar rumput melalui pengurangan biaya untuk aksi ekspresif dan pengorganisasian akar rumput, serta sekaligus memberdayakan kemampuan masyarakat umum untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dengan menyampaikan aspirasi mereka melalui sarana berbasis web seperti email, forum terkait, dan petisi online<sup>34</sup>. Difusi internet memiliki keterjangkauan yang memungkinkan demokratisasi bagi struktur peluang dari partisipasi politik di Asia Timur dan Tenggara, termasuk kemungkinan dari adanya aliran informasi secara horizontal yang termanifestasi dalam bentuk yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi aktor masyarakat sipil untuk mengambil keuntungan dari kanal untuk mempromosikan komunikasi politik dan asosiasi yang terjadi di luar sistem konvensional. Maksud dari di luar sistem konvensional dalam hal ini adalah aktivitas selain yang berhubungan dengan pemilihan tradisional, yang berujung kepada terbentuknya jaringan diantara mobilisasi agensi<sup>35</sup>. Hal tersebut, ditambah dengan ekspansi NGO dan organisasi internasional untuk HAM dan lingkungan secara global memberikan struktur peluang bagi kelompok masyarakat sipil untuk berunjuk rasa melawan sistem politik di dalam sebuah negara<sup>36</sup>. Putnam menunjukkan pentingnya kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam aksi politik dengan menekankan keberadaan jaringan sosial yang padat yang terbentuk dengan mengikuti berbagai organisasi sukarela yang memperkaya kewarganegaraan demokratis<sup>37</sup>. Terlebih lagi, interaksi sosial di dalam organisasi yang demikian dapat memfasilitasi koordinasi dan komunikasi yang kondusif akan kapital sosial.

---

<sup>33</sup> Shin Haeng Lee, "Alternative Information and Digital Citizenship: The Rise of Unconventional Political Participation in the Asian Context of Internet Use," *Journal of International and Area Studies*, Vol. 25, No. 1 (June 2018), 71-92.

<sup>34</sup> Gil de Zuniga et al., 2010 dalam Lee, "Alternative Information and Digital Citizenship", 77.

<sup>35</sup> Lee, "Alternative Information and Digital Citizenship", 73-74.

<sup>36</sup> Castells, 2008; Diamond, 1994 dalam Lee, "Alternative Information and Digital Citizenship", 74.

<sup>37</sup> Putnam. 2000 dalam Lee, "Alternative Information and Digital Citizenship", 75.

Analisis Ntuli & Teferra menunjukkan bahwa internet dan teknologi digital digunakan sebagai "platform strategis" yang baru untuk membantu pergerakan mahasiswa untuk mobilisasi dan koordinasi unjuk rasa<sup>38</sup>. Terdapat persamaan yang dimiliki oleh pergerakan sosial yang muncul pada abad ke-21: Pertama, penggunaan teknologi baru; Kedua, penggunaan politik internet dan aktivisme digital melalui pemilihan elektronik, kampanye digital, ruang bicara digital, atau mobilisasi virtual melalui Facebook dan Twitter<sup>39</sup>. Teknologi media menjadi penting untuk memiliki identitas dan target bersama, karena anggota ataupun pendukung dari pergerakan sosial tersebut dapat berada di belahan dunia yang berbeda saat mereka mengadakan aksi politik secara bersamaan di seluruh dunia<sup>40</sup>. Perangkat seluler yang digunakan oleh pergerakan tersebut menawarkan kecepatan yang tinggi untuk komunikasi dan mobilisasi.

Di Tiongkok, internet menjadi instrumen penting dalam pengadaan unjuk rasa baik secara daring ataupun luring. Karena internet, pembangkangan politik menjadi semakin transnasional dan radikal. Dengan sedikitnya ruang untuk oposisi politik di dalam Tiongkok, pembangkang menghubungi kontak di luar negeri untuk meminta dukungan dan visibilitas atas isu yang mereka angkat<sup>41</sup>. Dalam negara Asia Timur yang memiliki akar kebudayaan Konfusianisme, media sosial menjadi ruang daring yang aman dan nyaman bagi kalangan muda untuk berkomentar tentang kebijakan publik dan kejadian politik. Mereka dapat mengakses informasi di luar media pemerintah, menjalin jaringan dengan orang sebaya mereka, dan mengekspresikan pandangan pribadi mereka secara daring. Mahasiswa di Singapura, sebagai contoh, menunjuk kebijakan yang berdampak kepada keberlangsungan sosio-ekonomi secara daring dan menggunakan cyberspace untuk mengkoordinasi layanan sosial dan upaya

---

<sup>38</sup> Mthokozisi Emmanuel Ntuli & Damtew Teferra, "Implications of Social Media on Student Activism," *Journal of Higher Education in Africa / Revue de l'enseignement supérieur en Afrique*, Vol. 15, No. 2 (2017), 63-80.

<sup>39</sup> Ntuli & Teferra, "Implications of Social Media on Student Activism," 66.

<sup>40</sup> Ntuli & Teferra, "Implications of Social Media on Student Activism," 67.

<sup>41</sup> Guobin Yang, "Internet Activism & the Party-State in China," *Daedalus*, Spring 2014, Vol. 143, No. 2, Growing Pains in a Rising China (2014), 112.

penjangkauan masyarakat. Di Hong Kong, media sosial menjadi bagian integral dari lanskap politik Hong Kong karena media sosial memberi warga ruang baru untuk menyuarakan komplain mereka tentang kurangnya demokratisasi<sup>42</sup>. Perbedaan aktivisme antara Tiongkok dan negara barat seperti Amerika Serikat adalah adanya "partai oposisi" yang bisa secara reguler mengorganisir aktivisme dan protes, sedangkan pembentukan partai politik independen di Tiongkok tidak mungkin terjadi<sup>43</sup>.

## 1.6. Hipotesis

Amnesty International berupaya mengamplifikasi isu tindakan represif pemerintah Hong Kong dalam unjuk rasa anti-ekstradisi 2019-2020 melalui kanal aktivisme digital dengan menggunakan *Information, Symbolic, Leverage*, dan *Accountability Politics* dari efek bumerang TAN.

## 1.7. Metodologi Penelitian

### 1.7.1. Definisi dan Operasionalisasi Konsep

#### 1.7.1.1. *Transnational Advocacy Network*

Keck & Sikkink mendefinisikan *Transnational Advocacy Network* atau TAN sebagai kumpulan aktor yang bekerja di tingkat internasional dalam isu tertentu, yang berkumpul dengan kesamaan nilai yang dianut, diskursus yang serupa, dan pertukaran informasi dan jasa yang padat<sup>44</sup>. Dalam hal ini, interaksi transnasional dalam TAN didefinisikan sebagai pergerakan barang yang berwujud nyata atau tidak dengan aktor yang salah satunya terdiri dari aktor selain agen pemerintah atau organisasi antar pemerintah<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> Joseph Tse-Hei Lee, "Review Essay: Nonviolent Activism in a Networked Age," *Indian Journal of Asian Affairs*, Vol. 27/28. No. 1/2 (2014/2015), 100-101.

<sup>43</sup> Yang, "Internet Activism & the Party-State in China," 118.

<sup>44</sup> Keck & Sikkink, "Transnational advocacy networks in international and regional politics," 90.

<sup>45</sup> Joseph S. Nye Jr. & Robert O. Keohane, "Transnational Relations and World Politics: An Introduction," *International Organization*, Vol. 25, No. 3, Transnational Relations and World Politics (Summer 1971), 332.

#### 1.7.1.2. *Boomerang Pattern*

Pola bumerang seringkali terbentuk ketika kanal atau jaringan operasional aktor di dalam TAN di tingkat domestik terhambat ataupun tidak efektif untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi aktor-aktor tersebut. Pola bumerang merupakan salah satu diantara beberapa alasan terbentuknya TAN atas sebuah isu. Selain untuk membentuk pola bumerang sebagai cara pemecahan isu yang terhambat atau tidak efektif tersebut, TAN seringkali terbentuk ketika aktivis domestik percaya bahwa terbentuknya jaringan dapat membantu mendorong dan mempromosikan kampanye dan misi yang mereka usung, serta ketika konferensi internasional dan moda kontak internasional lain membentuk arena yang dapat mendorong terbentuknya serta memperkuat jaringan<sup>46</sup>.

##### 1.7.1.2.1. *Information Politics*

*Information politics* dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat informasi yang berguna secara politis dengan cepat dan terpercaya dan memindahkannya pada lokasi yang dapat menimbulkan dampak paling besar<sup>47</sup>.

##### 1.7.1.2.2. *Symbolic Politics*

*Symbolic politics* dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol, aksi, atau cerita yang masuk akal dan dapat dimengerti oleh audiens dengan kondisi yang jauh berbeda<sup>48</sup>.

##### 1.7.1.2.3. *Leverage Politics*

*Leverage politics* dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memanggil aktor kuat untuk mempengaruhi situasi yang sulit dipengaruhi atau diubah oleh anggota jaringan yang memiliki pengaruh yang lebih lemah<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> Keck & Sikkink, "Transnational advocacy networks in international and regional politics," 92-93.

<sup>47</sup> Keck & Sikkink, "Transnational advocacy networks in international and regional politics," 95-98.

<sup>48</sup> Keck & Sikkink, "Transnational advocacy networks in international and regional politics," 95-98.

<sup>49</sup> Keck & Sikkink, "Transnational advocacy networks in international and regional politics," 95-98.

#### 1.7.1.2.4. *Accountability Politics*

*Accountability politics* dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memegang akuntabilitas dari aktor yang lebih kuat atas kebijakan atau prinsip yang sebelumnya telah mereka keluarkan<sup>50</sup>.

#### 1.7.2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dalam menelaah dan menganalisis data. Analisis kualitatif adalah bentuk riset untuk menjelaskan hasil dari sebuah kasus tertentu melalui penjelasan yang berdasarkan pendekatan kasualitas atau sebab-akibat<sup>51</sup>. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan dalam analisis kualitatif meliputi pengumpulan data terkait masalah, reduksi data atau seleksi dan analisis data yang terkumpul, penyajian data atau organisasi informasi berdasarkan data yang diperoleh, dan penarikan kesimpulan<sup>52</sup>.

#### 1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diambil dari publikasi resmi Amnesty International, cuitan Aktivis Hong Kong yang berkaitan dengan unjuk rasa Hong Kong 2019-2020, dan pernyataan resmi dari pemerintah Hong Kong. Data sekunder diambil dari artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan berita yang berkaitan dengan unjuk rasa Hong Kong 2019-2020.

#### 1.7.4. Jangkauan Penelitian

---

<sup>50</sup> Keck & Sikkink, "Transnational advocacy networks in international and regional politics," 95-98.

<sup>51</sup> James Mahoney & Gary Goertz, "A Tale of Two Cultures: Contrasting Qualitative and Quantitative Research," *Political Analysis*, 14 (2006), 230.

<sup>52</sup> Miles & Huberman, 1992 dalam Albi Anggito & Johan Setiawan, "Bab VI Tahap-Tahap Penelitian" dalam *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 181-182.

Jangkauan penelitian skripsi ini dimulai pada Februari 2019 hingga Juni 2020, mulai dari awal terjadinya unjuk rasa hingga keluarnya *national security law* yang mengakibatkan berhentinya semua aktivitas terkait unjuk rasa Hong Kong 2019-2020.

#### 1.7.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab. Bab I adalah pendahuluan. Bab II membahas mengenai detail gerakan aktivisme demokrasi digital Hong Kong tahun 2019-2020. Bab III membahas tentang aktivitas digital Amnesty International dan analisisnya. Bab IV adalah kesimpulan.